



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG
PERSEDIAAN (GU), DAN TAMBAH UANG (TU) PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penetapan besaran uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambah uang sebagaimana yang tertuang dalam keketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penetapan besaran uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Dan Tambah Uang (TU) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); *un*

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 98). *Ma*

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU), DAN TAMBAH UANG (TU) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. *MA*

10. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai uang muka kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

PENETAPAN, CARA PENGAJUAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2

Uang Persediaan dapat diberikan pertama kali awal tahun anggaran untuk pengeluaran-pengeluaran Klasifikasi Belanja Kelompok Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal yang tidak di Pihak Ketiga-kan

Pasal 3

- (1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan disesuaikan dengan pagu anggaran masing-masing SKPD.
- (2) Besarnya jumlah Uang Persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA sesuai klasifikasi belanja yang diijinkan untuk pemberian Uang Persediaan.
- (3) Khusus Uang Persediaan bagi Kelurahan diberikan setinggi-tingginya 1/4 (seper empat) dari pagu DPA sesuai klasifikasi belanja yang diijinkan untuk pemberian Uang Persediaan.
- (4) Batas jumlah Uang Persediaan pada SKPD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengajuan besara Uang Persediaan pada tiap SKPD tidak boleh melebihi batas Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4). *MR*

Pasal 5

Pengajuan Gantu Uang Persediaan diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dengan melampirkan :

- a. Surat pengantar SPP-GU;
- b. Ringkasan SPP-GU;
- c. Rincian SPP-GU;
- d. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendaha pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP;
- e. Salinan SPD;
- f. Surat pernyataan untuk ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang dimintakan tidak dipergunakan untuk keperluan selain selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD; dan
- g. Lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 6

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan Tambah Uang.

Pasal 7

Batas jumlah pengajuan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 8

Besarnya Pengajuan Tambahan Uang Persediaan dapat diberikan maksimal untuk **3 (tiga)** kegiatan dan/atau setinggi-tingginya **Rp.350.000.000** (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Batas waktu penyampaian Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan paling lambat 1 (satu) bulan, dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dana Tambah Uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.

Pasal 10

Pengajuan Tambahan Uang Persediaan berikutnya dapat diberikan jika Tambahan Uang Persediaan yang lalu telah di nihilkan atau dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Penyampaian Pertanggungjawaban Ganti Uang Nihil dan Tambahan Uang Nihil akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya baik ada maupun tidak ada transaksi penerimaan SP2D dan pengeluaran belanja. *MM*

Pasal 12

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan Uang Persediaan yang dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam DPA, dan berdasar pada prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu.


**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 2 Januari 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA,**


H. RUKSAMIN 

Diundangkan di : Wanggudu
pada tanggal : 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,**



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 236



**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA**

NO	Unit Organisasi	Jumlah Belanja Langsung	belanja modal	Taksiran Belanja Menurut Klasifikasi UP	Pagu Definitif
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	68,808,444,856.00	41,800,175,000.00	27,008,269,856	2,200,000,000
2	UPT SKB	1,449,000,000.00	1,235,745,000.00	213,255,000	41,500,000
3	DINAS KESEHATAN	33,911,157,500.00	8,818,060,000.00	25,093,097,500	2,000,000,000
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11,290,452,000.00	3,430,067,000.00	7,860,385,000	650,000,000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	72,113,260,050.00	66,765,743,000.00	5,347,517,050	440,000,000
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	6,075,000,000.00	4,253,470,000.00	1,821,530,000	175,000,000
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,885,000,000.00	287,000,000.00	3,598,000,000	350,000,000
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5,251,000,000.00	76,000,000.00	5,175,000,000	420,000,000
9	DINAS SOSIAL	2,450,000,000.00	753,200,000.00	1,696,800,000	160,000,000
10	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	6,700,000,000.00	4,775,550,000.00	1,924,450,000	160,000,000
11	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA	990,000,000.00	392,000,000.00	598,000,000	55,000,000
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,313,300,000.00	515,300,000.00	1,798,000,000	150,000,000
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	2,340,000,000.00	439,250,000.00	1,900,750,000	175,000,000
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11,849,000,000.00	6,030,780,000.00	5,818,220,000	450,000,000
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,121,416,300.00	43,800,000.00	2,077,616,300	220,000,000
16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2,081,416,300.00	325,500,000.00	1,755,916,300	140,000,000
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2,891,383,000.00	701,800,000.00	2,189,583,000	180,000,000
18	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	3,480,000,000.00	616,350,000.00	2,863,650,000	230,000,000
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19,335,078,000.00	1,615,850,000.00	17,719,228,000	1,400,000,000
20	DINAS PERHUBUNGAN	6,666,176,000.00	4,877,826,000.00	1,788,350,000	140,000,000
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,300,000,000.00	260,000,000.00	3,040,000,000	250,000,000
22	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	2,550,000,000.00	106,900,000.00	2,443,100,000	210,000,000
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4,090,000,000.00	1,337,750,000.00	2,752,250,000	220,000,000
24	DINAS PERPUSTAKAAN	2,325,000,000.00	156,500,000.00	2,168,500,000	220,000,000
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,430,955,000.00	2,862,250,000.00	3,568,705,000	320,000,000


	2	3	4	5	6
26	DINAS PARIWISATA				
27	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	4,687,461,000.00	3,175,289,000.00	1,512,172,000	150,000,000
28	DINAS PERKEBUNAN	11,425,125,000.00	6,688,525,000.00	4,736,600,000	400,000,000
29	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1,781,400,000.00	423,400,000.00	1,358,000,000	120,000,000
30	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	11,709,902,000.00	10,089,902,000.00	1,620,000,000	200,000,000
31	BAGIAN HUMAS DAN TELEMATIKA	18,035,000,000.00	155,000,000.00	17,880,000,000	1,400,000,000
32	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	2,281,416,300.00	229,150,000.00	2,052,266,300	170,000,000
33	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	15,872,000,000.00	9,839,154,500.00	6,032,845,500	230,000,000
34	BAGIAN HUKUM	2,350,000,000.00	164,000,000.00	2,186,000,000	200,000,000
35	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,714,700,000.00	49,500,000.00	1,665,200,000	150,000,000
36	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	3,819,800,000.00	1,459,800,000.00	2,360,000,000	180,000,000
37	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	1,200,000,000.00	71,000,000.00	1,129,000,000	90,000,000
38	BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN	850,000,000.00	75,250,000.00	773,750,000	60,000,000
39	SEKERTARIAT DPRD	5,195,816,300.00	86,000,000.00	5,109,816,300	400,000,000
40	KECAMATAN SAWA	17,995,000,000.00	572,500,000.00	17,422,500,000	1,200,000,000
41	KECAMATAN LASOLO	350,000,000.00	8,000,000.00	342,000,000	85,500,000
42	KECAMATAN ASERA	350,000,000.00	0.00	350,000,000	87,500,000
43	KECAMATAN WIWIRANO	350,000,000.00	21,100,000.00	328,900,000	82,225,000
44	KECAMATAN MOLAWA	375,000,000.00	30,000,000.00	345,000,000	86,250,000
45	KECAMATAN LEMBO	392,000,000.00	17,500,000.00	374,500,000	93,625,000
46	KECAMATAN LANGGIKIMA	350,000,000.00	25,000,000.00	325,000,000	81,250,000
47	KECAMATAN OHEO	375,000,000.00	0.00	375,000,000	93,750,000
48	KECAMATAN ANDOWIA	350,000,000.00	7,500,000.00	342,500,000	85,625,000
49	KECAMATAN MOTUI	350,000,000.00	36,000,000.00	314,000,000	78,500,000
50	KECAMATAN WAWOLESEA	375,000,000.00	26,400,000.00	348,600,000	87,150,000
51	KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN	350,000,000.00	14,500,000.00	335,500,000	83,875,000
52	KECAMATAN LANDAWE	375,000,000.00	32,500,000.00	342,500,000	85,625,000
53	KELURAHAN WANGGUDU	375,000,000.00	0.00	375,000,000	93,750,000
54	KELURAHAN TINOBU	250,000,000.00	27,000,000.00	223,000,000	55,750,000
55	KELURAHAN LEMBO	250,000,000.00	11,500,000.00	238,500,000	59,625,000
56	KELURAHAN ANDOWIA	250,000,000.00	9,500,000.00	240,500,000	60,125,000
57	KELURAHAN LANGGIKIMA	250,000,000.00	0.00	250,000,000	62,500,000
58	KELURAHAN SAWA	275,000,000.00	0.00	275,000,000	68,750,000
59	KELURAHAN MOLAWA	250,000,000.00	0.00	250,000,000	62,500,000
60	KELURAHAN LAMONAE	250,000,000.00	0.00	250,000,000	62,500,000
		275,000,000.00	0.00	275,000,000	68,750,000

	3	4	5	6
61 KELURAHAN ASERA	250,000,000.00	0.00	250,000,000	62,500,000
62 KELURAHAN LINOMOYO	250,000,000.00	0.00	250,000,000	62,500,000
63 KELURAHAN BENDE	275,000,000.00	30,300,000.00	244,700,000	61,175,000
64 KELURAHAN HIALU	275,000,000.00	0.00	275,000,000	68,750,000
65 KELURAHAN BOENAGA	275,000,000.00	8,500,000.00	266,500,000	66,625,000
66 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	5,690,000,000.00	2,465,659,000.00	3,224,341,000	300,000,000
67 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA	5,488,000,000.00	1,075,715,000.00	4,412,285,000	360,000,000
68 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5,400,000,000.00	1,221,500,000.00	4,178,500,000	400,000,000
69 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	18,600,380,000.00	1,224,000,000.00	17,376,380,000	500,000,000
70 DINAS PENDAPATAN	2,900,000,000.00	785,500,000.00	2,114,500,000	170,000,000
71 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3,600,000,000.00	336,000,000.00	3,264,000,000	350,000,000

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI KONAWA UTARA


H. RUKSAMIN